

BIJAK BERMEDIA SOSIAL DALAM MENDUKUNG STABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI DESA LEKIS REJO

Wise Use of Social Media to Support Stable Village Governance in Lekis Rejo Village

**Marshanda Lievia^{1*},
Eva Susanti²,
Aprilia Lestari³,
Agata Lively⁴,
Avira Miranda⁵,
Eem Rahmawati⁶**

^{*1-6} Program Studi Ilmu
Pemerintahan Universitas
Baturaja

*email:
marshandalievia2@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Media sosial sebagai salah satu produk perkembangan teknologi memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, serta interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Namun, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan literasi digital yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konflik sosial, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Lekis Rejo dalam menggunakan media sosial secara bijak guna mendukung stabilitas tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2026 dengan melibatkan 20 peserta. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan penyebaran kuesioner kepuasan peserta. Materi disampaikan oleh Eva Susanti, M.Si., Aprilia Lestari, M.I.P dan Marshanda Lievia. Hasil kuesioner menunjukkan tingkat kepuasan peserta sebesar 92% dengan kategori sangat baik. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi literasi digital mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi, menerapkan etika digital, serta memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab.

Kata Kunci:

Literasi Digital, Partisipasi
Masyarakat, Transparansi
Pemerintahan Desa,
Akuntabilitas Pemerintahan
Desa

Keywords:

Digital Literation, Community
Participation, Transparency in
Village Governance, Accountability
in Village Governance

Abstract

Advances in information and communication technology have brought about significant changes in patterns of social interaction, including in rural areas. Social media, as one of the products of technological advancement, plays a strategic role in the dissemination of information, the formation of public opinion, and interactions between the public and the government. However, the use of social media without adequate digital literacy has the potential to cause various problems, such as the spread of misinformation, hate speech, social conflict, and a decline in public trust in the village government. This community service activity aimed to enhance the understanding of the residents of Lekis Rejo Village in using social media wisely to support the stability of village governance. The activity was held on May 16, 2026, with 20 participants. The implementation methods included initial observation, presentation of materials, interactive discussions, and the distribution of participant satisfaction questionnaires. The material was presented by Eva Susanti, M.Si., Aprilia Lestari, M.I.P., and Marshanda Lievia. The questionnaire results showed a participant satisfaction rate of 92%, categorized as "very good." The results of this activity indicate that digital literacy outreach is effective in raising public awareness regarding verifying information, applying digital ethics, and using social media responsibly.

Submit Tgl.: 21-Juni-2026

Diterima Tgl.: 23-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 25-Juni-2026

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam era digital saat ini, keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan publik dan kebijakan pembangunan, tetapi juga oleh

kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi secara tepat. Salah satu media yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan adalah media sosial.

Media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh, menyebarkan, dan bertukar informasi. Di tingkat desa, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian informasi pembangunan, pelayanan publik, program kerja pemerintah desa, serta sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial yang tepat dapat meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Namun demikian, perkembangan media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas tata kelola pemerintahan desa. Penyebaran informasi yang tidak benar, berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan informasi provokatif sering kali beredar dengan cepat melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik sosial, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai.

Stabilitas tata kelola pemerintahan desa membutuhkan dukungan masyarakat yang mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu memilah informasi, melakukan verifikasi terhadap sumber informasi, memahami etika komunikasi digital, serta berpartisipasi secara positif dalam mendukung program-program pemerintah desa. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Lekis Rejo, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat telah aktif menggunakan media sosial, khususnya WhatsApp dan Facebook, sebagai sarana komunikasi dan memperoleh informasi. Akan tetapi, masih ditemukan kebiasaan membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, kurangnya pemahaman mengenai etika bermedia sosial, serta rendahnya kesadaran terhadap keamanan data pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memerlukan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang bijak guna mendukung terciptanya lingkungan sosial yang kondusif dan tata kelola pemerintahan desa yang stabil.

Melihat kondisi tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi “Bijak Bermedia Sosial dalam Mendukung Stabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Lekis Rejo.” Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital, etika bermedia sosial, pencegahan penyebaran hoaks, serta pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana yang mendukung transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat Desa Lekis Rejo mampu menjadi pengguna media sosial yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam kegiatan ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan sosialisasi bijak bermedia sosial dapat meningkatkan literasi digital masyarakat Desa Lekis Rejo. Kegiatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi efektivitas sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab,

etis, serta kemampuan dalam menyaring dan memverifikasi informasi yang diterima maupun disebarkan melalui platform digital.

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat Desa Lekis Rejo dalam menggunakan media sosial secara bijak. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diharapkan mampu memahami etika bermedia sosial, mengenali berbagai bentuk informasi yang tidak valid atau menyesatkan, serta memiliki keterampilan dalam memilah dan memanfaatkan informasi secara tepat sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan digital yang sehat dan produktif.

Kegiatan sosialisasi bijak bermedia sosial ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, kegiatan ini dapat meningkatkan literasi digital serta kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Bagi pemerintah desa, kegiatan ini mendukung terciptanya stabilitas tata kelola pemerintahan melalui masyarakat yang lebih kritis dan cerdas dalam menerima informasi. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, kegiatan ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan literasi digital di lingkungan pedesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan menyebarkan informasi melalui teknologi digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Menurut Nasrullah (2019), literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh melalui media digital.

Dalam konteks pemerintahan desa, literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik mampu mengakses informasi pembangunan desa, memahami kebijakan pemerintah desa, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh hoaks dan disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun pemerintahan desa.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021), literasi digital terdiri dari empat pilar utama yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Keempat aspek tersebut menjadi fondasi dalam membangun masyarakat digital yang cerdas dan bertanggung jawab.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat diberikan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui musyawarah desa, penyampaian aspirasi, pengawasan pembangunan, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta memperoleh informasi mengenai

kebijakan pemerintah desa secara lebih cepat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa.

Transparansi Pemerintahan Desa

Transparansi merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang mengharuskan pemerintah membuka akses informasi kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan mudah dipahami. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa, transparansi sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa, pelaksanaan pembangunan, serta berbagai program yang dijalankan pemerintah desa. Keterbukaan informasi tersebut dapat meningkatkan pengawasan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Media sosial dan teknologi digital menjadi sarana yang efektif dalam mendukung transparansi pemerintahan desa. Informasi mengenai kegiatan pemerintahan dapat disampaikan secara cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan media digital yang didukung oleh literasi digital masyarakat dapat memperkuat prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang harus pemerintah lakukan untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan-kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Menurut Mahmudi (2015), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang diberikan amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memberikan amanah.

Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyampaian laporan kegiatan, laporan keuangan, serta keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu pemerintah desa menyampaikan laporan dan informasi publik secara lebih efektif. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mudah memahami informasi tersebut sehingga fungsi pengawasan masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Stabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, menjamin transparansi, serta memiliki akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Stabilitas tata kelola pemerintahan desa dapat tercapai apabila terdapat hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Hubungan tersebut ditandai dengan adanya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat yang aktif, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah desa.

Literasi digital berperan sebagai instrumen yang mampu memperkuat stabilitas tata kelola pemerintahan desa. Melalui kemampuan mengakses dan memverifikasi informasi, masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah secara lebih baik sehingga mengurangi potensi konflik akibat disinformasi. Selain itu, media sosial yang digunakan secara bijak dapat meningkatkan transparansi informasi desa, memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode Observasi, Perencanaan, Evaluasi, dan Refleksi. Metode tersebut dipilih untuk memastikan kegiatan sosialisasi dapat berjalan secara sistematis serta memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan media sosial secara bijak dalam mendukung stabilitas tata kelola pemerintahan desa di Desa Lekis Rejo.

Observasi

Tahap observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat terkait penggunaan media sosial dan tingkat pemahaman literasi digital. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan komunikasi dengan masyarakat serta perangkat desa.

Aspek yang diamati meliputi:

1. Intensitas penggunaan media sosial oleh masyarakat.
2. Sumber informasi yang sering digunakan masyarakat.
3. Pemahaman masyarakat terhadap literasi digital.
4. Potensi penyebaran hoaks dan disinformasi.
5. Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pemerintahan desa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menggunakan media sosial, khususnya WhatsApp dan Facebook, sebagai sarana memperoleh informasi. Namun, masih ditemukan kebiasaan membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik sosial.

Perencanaan

Berdasarkan hasil observasi, tim pelaksana menyusun perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Lekis Rejo. Tahap ini bertujuan untuk merancang kegiatan sosialisasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang bijak.

Kegiatan perencanaan meliputi:

1. Menentukan tema dan tujuan kegiatan.
2. Menyusun materi sosialisasi mengenai literasi digital, partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan desa, dan akuntabilitas pemerintahan desa.

3. Menentukan metode penyampaian materi berupa ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus.
4. Menyiapkan instrumen evaluasi berupa kuesioner dan daftar pertanyaan diskusi.
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Lekis Rejo terkait pelaksanaan kegiatan.

Materi yang disusun difokuskan pada upaya meningkatkan transparansi informasi desa, mengurangi konflik akibat disinformasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai penggunaan media sosial secara bijak.

Evaluasi dilakukan melalui:

1. Pengamatan terhadap keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.
2. Sesi tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
3. Penyebaran kuesioner kepuasan peserta pada akhir kegiatan.

Indikator evaluasi meliputi:

1. Pemahaman peserta mengenai literasi digital.
2. Pemahaman peserta mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
3. Kemampuan peserta dalam mengenali informasi hoaks.
4. Tingkat partisipasi peserta selama kegiatan.
5. Kepuasan peserta terhadap materi dan pelaksanaan kegiatan.

Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan serta mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta setelah mengikuti sosialisasi.

Refleksi

Tahap refleksi dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Refleksi bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta peluang pengembangan kegiatan di masa mendatang.

Refleksi dilakukan melalui diskusi bersama peserta dan pemerintah desa mengenai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Fokus refleksi meliputi:

1. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital.
2. Peran media sosial dalam meningkatkan transparansi informasi desa.
3. Upaya pencegahan konflik akibat penyebaran informasi yang tidak benar.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Melalui tahap refleksi diperoleh pemahaman bahwa penggunaan media sosial yang bijak dapat menjadi sarana untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan demikian, literasi digital dapat berkontribusi dalam mendukung stabilitas tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Bijak Bermedia Sosial dalam Mendukung Stabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Lekis Rejo” dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2026 dengan melibatkan 20 peserta yang berasal dari masyarakat Desa Lekis Rejo. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Materi yang disampaikan meliputi pengenalan literasi digital, etika bermedia sosial, bahaya penyebaran hoaks, keamanan data pribadi, serta teknik sederhana dalam melakukan verifikasi informasi. Penyampaian materi dilakukan oleh Eva Susanti, M.Si., Aprilia Lestari, M.I.P., dan Marshanda Lievia dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab.

Selama proses penyampaian materi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari keterlibatan peserta dalam diskusi serta banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait pengalaman mereka ketika menggunakan media sosial. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka sering menerima informasi yang belum diketahui kebenarannya melalui grup WhatsApp keluarga maupun grup masyarakat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap edukasi literasi digital sangat tinggi sehingga kegiatan sosialisasi ini menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga memberikan contoh-contoh kasus yang sering terjadi di media sosial, seperti penyebaran berita palsu, penipuan daring, dan penyalahgunaan data pribadi. Melalui studi kasus tersebut peserta diajak untuk memahami dampak yang dapat ditimbulkan apabila informasi disebarkan tanpa proses verifikasi. Pendekatan ini membuat peserta lebih mudah memahami materi karena dikaitkan langsung dengan situasi yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Digital

Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijaksana. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih menganggap bahwa semua informasi yang beredar di media sosial merupakan informasi yang benar dan layak untuk disebarluaskan.

Setelah mengikuti sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Peserta mulai memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di internet dapat dipercaya. Informasi yang berasal dari sumber yang tidak jelas harus diperiksa terlebih dahulu melalui media resmi atau sumber yang kredibel.

Peningkatan pemahaman ini terlihat selama sesi diskusi berlangsung. Sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri berita hoaks, seperti penggunaan judul yang provokatif, sumber informasi yang tidak jelas, serta isi informasi yang tidak didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Peserta juga mulai memahami pentingnya

berpikir kritis terhadap informasi yang diterima sebelum memberikan respons atau menyebarkannya kepada pengguna lain.

Selain itu, peserta memperoleh wawasan mengenai dampak negatif penyebaran informasi palsu terhadap kehidupan sosial masyarakat. Mereka menyadari bahwa tindakan sederhana seperti membagikan informasi yang belum diverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik sosial, bahkan keresahan di lingkungan masyarakat. Kesadaran tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi digital yang semakin kompleks.

Pemahaman Masyarakat terhadap Etika Bermedia Sosial

Selain meningkatkan kemampuan literasi digital, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika bermedia sosial. Dalam era digital, komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga melalui berbagai platform media sosial. Oleh karena itu, etika dalam berkomunikasi menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Masih terdapat anggapan bahwa media sosial merupakan ruang bebas yang memungkinkan seseorang menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Padahal, setiap aktivitas yang dilakukan di ruang digital memiliki konsekuensi sosial maupun hukum.

Melalui kegiatan sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan bahasa yang santun, menghargai pendapat orang lain, menjaga privasi pengguna lain, serta menghindari penyebaran ujaran kebencian dan informasi yang bersifat provokatif. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai jejak digital yang dapat tersimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga setiap aktivitas di media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di ruang digital. Kesadaran tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat dan harmonis, baik di media sosial maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Hoaks

Hoaks merupakan salah satu permasalahan utama yang sering ditemukan dalam penggunaan media sosial. Informasi palsu dapat menyebar dengan sangat cepat karena kemudahan fitur berbagi yang tersedia pada berbagai platform digital. Dalam konteks masyarakat desa, penyebaran hoaks dapat memengaruhi hubungan sosial masyarakat dan menimbulkan berbagai kesalahpahaman.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk memverifikasi informasi. Langkah tersebut antara lain memeriksa sumber informasi, membandingkan informasi dengan media terpercaya, memeriksa tanggal publikasi, serta melakukan pencarian informasi tambahan melalui situs resmi.

Pemberian pemahaman mengenai cara mengenali hoaks menjadi sangat penting karena masyarakat saat ini dihadapkan pada jumlah informasi yang sangat besar setiap harinya. Kemampuan memilah informasi yang benar dan salah merupakan salah satu bentuk literasi digital yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya proses verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi merugikan masyarakat maupun pemerintah desa.

Kontribusi Literasi Digital terhadap Stabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Literasi digital memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas tata kelola pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang baik membutuhkan dukungan masyarakat yang aktif, kritis, dan memiliki akses terhadap informasi yang akurat. Media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat apabila digunakan secara tepat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai program pembangunan desa, pelayanan publik, dan berbagai kegiatan pemerintahan lainnya. Dengan meningkatnya kemampuan literasi digital masyarakat, informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa dapat diterima dan dipahami secara lebih baik.

Selain itu, kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi dapat membantu mengurangi penyebaran isu atau informasi yang tidak benar terkait kebijakan pemerintah desa. Kondisi ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta menciptakan suasana sosial yang kondusif. Peningkatan literasi digital juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat yang memiliki pemahaman digital yang baik cenderung lebih aktif dalam memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta mengikuti berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai kemampuan teknis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Analisis Karakteristik Peserta

Peserta kegiatan sosialisasi berjumlah 20 orang yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat Desa Lekis Rejo. Berdasarkan jenis kelamin, peserta didominasi oleh laki-laki sebanyak 18 orang (90%), sedangkan peserta perempuan berjumlah 2 orang (10%). Dominasi peserta laki-laki menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam kegiatan sosialisasi literasi digital di Desa Lekis Rejo cukup tinggi. Namun demikian, partisipasi perempuan juga tetap penting karena perempuan memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan status peserta, sebanyak 15 orang (75%) merupakan aparatur desa dan 5 orang (25%) merupakan perwakilan masyarakat. Tingginya keterlibatan aparatur desa menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Sementara itu, keikutsertaan masyarakat bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai literasi digital sehingga tercipta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	18	90%
Perempuan	2	10%
Total	20	100%

Tabel 2. Karakteristik Peserta Berdasarkan Status Peserta

Status Peserta	Jumlah	Persentase
Aparatur Desa	15	75%
Masyarakat	5	25%
Total	20	100%

Interpretasi Data Peserta

Komposisi peserta yang didominasi oleh aparatur desa memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kegiatan karena aparatur desa merupakan pihak yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan publik dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman aparatur desa mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial, diharapkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini juga berperan penting dalam menciptakan budaya digital yang sehat sehingga dapat mendukung stabilitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3. Hasil Kepuasan Peserta

Aspek	Persentase	Kategori
Kesesuaian materi	95%	Sangat baik
Kemampuan pemateri	90%	Sangat baik
Diskusi interaktif	90%	Sangat baik
Manfaat Kegiatan	95%	Sangat baik
Kepuasan Keseluruhan	92%	Sangat baik

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa puas terhadap pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi “Bijak Bermedia Sosial dalam Mendukung Stabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Lekis Rejo” menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai etika bermedia sosial, verifikasi informasi, pencegahan penyebaran hoaks, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Masyarakat juga semakin memahami bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan penguatan hubungan antara pemerintah desa dengan warga. Tingginya tingkat kepuasan peserta terhadap materi dan pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta efektif dalam meningkatkan kesadaran digital di tingkat desa.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan karena jumlah peserta yang relatif terbatas dan evaluasi yang masih berfokus pada pengukuran pemahaman sesaat setelah kegiatan berlangsung sehingga belum dapat menggambarkan perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian dan kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan melibatkan jumlah peserta yang lebih besar, menggunakan metode evaluasi pra dan pasca kegiatan, serta melakukan pendampingan berkelanjutan untuk mengukur dampak literasi digital secara lebih komprehensif. Secara praktis, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa program literasi digital perlu menjadi agenda berkelanjutan yang melibatkan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat guna membangun budaya digital

yang sehat, meningkatkan ketahanan terhadap disinformasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. D., Indrawati, & Jawasi. (2024). Efektivitas Literasi Digital dan Informasi Melalui Media Sosial Facebook Tokoh Masyarakat Bagi Warga Desa Terusan. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 1(4), 605–610.
- Fisseler, B. (2024). Digital Accessibility Literacy: A Conceptual Framework for Training on Digital Accessibility. *International Journal of Digital Education*, 5(2), 1–15
- Hadi, S., & Prasetyo, B. (2023). Literasi Digital sebagai Strategi Menangkal Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(2), 145–157.
- Huda, M., Maulana, I., Uriva, M., & Hidayati, L. (2024). Pemanfaatan Literasi Digital Melalui Pengelolaan Website dan Media Sosial Desa Menuju Desa Go Digital. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(1), 92–102.
- Maillart, T., Gomez, L., Lombard, E., Nolte, A., & Pisano, F. (2024). Computational Diplomacy: How Hackathons for Good Feed a Participatory Future for Multilateralism in the Digital Age. *Digital Governance Studies*, 4(1), 1–20.
- Maulana, A. (2023). Literasi Digital Dalam Mencegah Penyebaran Konten Hoaks Pada Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–8.
- Nugroho, Y., & Widodo, A. (2023). Ketahanan Masyarakat terhadap Disinformasi di Era Digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 22(3), 310–322.
- Rahmawati, D. (2023). Literasi Digital dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 8(2), 45–56.
- Rodiyah, I., & Bolanitan, Z. O. (2024). Enhancing Digital Literacy in Village Government for Effective SID Program Implementation. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24.
- Setyaningsih, R., Abdullah, A., & Prihantoro, E. (2023). Penguatan Literasi Digital dalam Membangun Masyarakat Informasi. *Jurnal ASPIKOM*, 8(1), 25–38.
- ulmasyhur, Setiawan, H. D., & Werang, N. P. L. (2024). Enhancing Governance Through Digital Transformation. *Jurnal Governansi*, 10(1), 127–136.
- Wahyuni, S. (2024). Budaya Digital dan Transformasi Komunikasi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 66–78.
- Windyaningrum, R. (2024). Kompetensi Literasi Data dan Informasi Media Sosial Aparatur Pemerintah Desa Ciburial dan Kelompok Masyarakat Informasi. *Jurnal Common*, 7(2), 98–111
- Windyaningrum, R., Kusumawindarti, N., Rubyasih, A., & Koesanto, S. M. A. A. (2023). Model Keterampilan Literasi Digital Media Sosial Pada Aparatur Desa dan Kelompok Masyarakat Informasi Kabupaten Bandung. *Anterior Jurnal*, 22(Special Issue), 120–131.
- Yar, F. M. (2024). Digital Transformation in Rural Communities: Enhancing Village Governance and Citizen Participation. *Journal of Village Development Innovation*, 1(1), 1–12.

LAMPIRAN



Sambutan Kepala Desa Lekis Rejo
Dan penyampaian materi oleh
Mahasiswa Program Studi Ilmu
Pemerintahan



Penyampaian materi dari Dosen Program
Studi Ilmu Pemerintahan



Foto Bersama dengan Aparat Desa, Masyarakat, serta Mahasiswa dan Dosen Pemateri